



**RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BATAM**

**PEMERINTAH KOTA BATAM
TAHUN 2019**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Batam. DPM-PTSP Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan membawahi Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang.

Sesuai Peraturan Daerah tersebut kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Batam.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 56 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan uraian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Adapun tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam adalah sebagai berikut: Merumuskan, Membina, Mengendalikan, Mengkoordinasikan dan Mempertanggungjawabkan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam mempunyai Fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis di Bidang Promosi, Data dan Informasi, Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan, Bidang Perizinan Ekonomi Sosial, Bidang Perizinan Pembangunan dan Lingkungan hidup;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Promosi, Data dan Informasi, Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan, Bidang Perizinan Ekonomi dan Sosial, Bidang Perizinan Pembangunan Lingkungan dan hidup.
3. pembinaan dan pelaksanaan dibidang Promosi, Data dan Informasi, Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan, Bidang Perizinan Ekonomi dan Sosial, Bidang Perizinan Pembangunan Lingkungan dan hidup.
4. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam terdiri dari :

- Sekretariat / Sekretaris (terdiri dari subbag. Program, subbag. Keuangan dan subbag. Umum dan Kepegawaian).
- Bidang Promosi, Data dan Informasi Investasiterdiri dari subbid. Promosi, subbid. Data Investasi dan subbid. Informasi Investasi).
- Bidang Pengawasan, pengendalian dan Pengaduan penanaman modal dan perizinan, (terdiri dari Kasi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, Kasi Pengaduan, Fasilitas dan Advokasi, dan Kasi Pengawasan dan pengendalian Perizinan).
- Bidang Perizinan Ekonomi dan Sosial (terdiri dari Kasi Perizinan Sosial, Kasi Perizinan Ekonomi dan Kasi Perizinan Penanaman Modal).
- Bidang Perizinan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Utilitas (terdiri dari Kasi Perizinan Pembangunan, Kasi Perizinan Lingkungan Hidup dan Kasi Perizinan Utilitas).

- Bidang Promosi, Data dan Informasi (terdiri dari Kasi Promosi, Kasi Data Penanaman Modal dan Kasi Informasi Penanaman Modal);

1.2. Landasan Hukum

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar kebijakan yang di gunakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Tahun 2019 ini dibuat sebagai tindak lanjut terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Sistematis penulisan penyusunan Rencana awal Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2019, merupakan penjabaran terhadap pencapaian Target Indikator Tahun 2019 yang tercantum dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2019.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan (*Critical Success Factors*) untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan, maka terlebih dahulu perlu dianalisa sampai seberapa jauh misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern organisasi. Dengan mengetahui pengaruh intern dan ekstern organisasi, maka untuk dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas perlu didorong dan ditumbuh kembangkan faktor-faktor yang memberi kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) guna dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan organisasi.

Sebaliknya faktor-faktor yang menghambat organisasi seperti kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*) dapat diantisipasi dan diatasi sejak dini agar tidak berpengaruh negatif terhadap upaya mencapai tujuan organisasi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam mempergunakan Analisa SWOT berhasil

merumuskan dan menganalisa lingkungan Internal (ALI) dan menganalisa Lingkungan Eksternal (ALE) yaitu sebagai berikut :

- ✓ Peraturan Daerah No.10/2016 tentang Susunan dan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah:
- ✓ Perwako Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja OPD dan perwako Batam nomor 56 tahun 2016 tentang Tupoksi.

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam yang PNS per Juni 2019 berjumlah 38 Orang sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut;

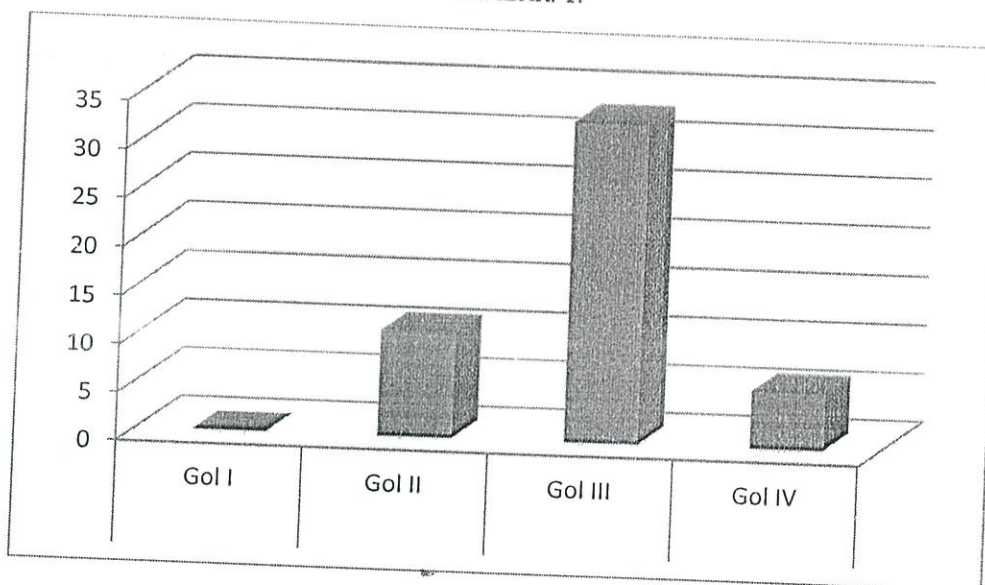
KONDISI PEGAWAI MENURUT TINGKAT STRATA PENDIDIKAN
TABEL. 1.

| No. | Penempatan | Menurut Pendidikan | | | | | Jumlah |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|--------|
| | | SMU | D3 | S1 | S2 | S3 | |
| 1. | Kepala | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 2. | Sekretariat | 1 | 3 | 6 | 1 | - | 11 |
| 3. | Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi | - | 1 | 2 | 2 | - | 5 |
| 4. | Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal Dan Perizinan | - | 1 | 7 | - | - | 8 |
| 5. | Bidang Perizinan Sosial dan Ekonomi | - | - | 5 | 2 | - | 7 |
| 6. | Bidang Perizinan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Utilitas | 1 | - | 3 | 2 | - | 6 |
| Jumlah | | 2 | 5 | 23 | 8 | 1 | 38 |

KONDISI PEGAWAI MENURUT GOLONGAN
TABEL. 2.

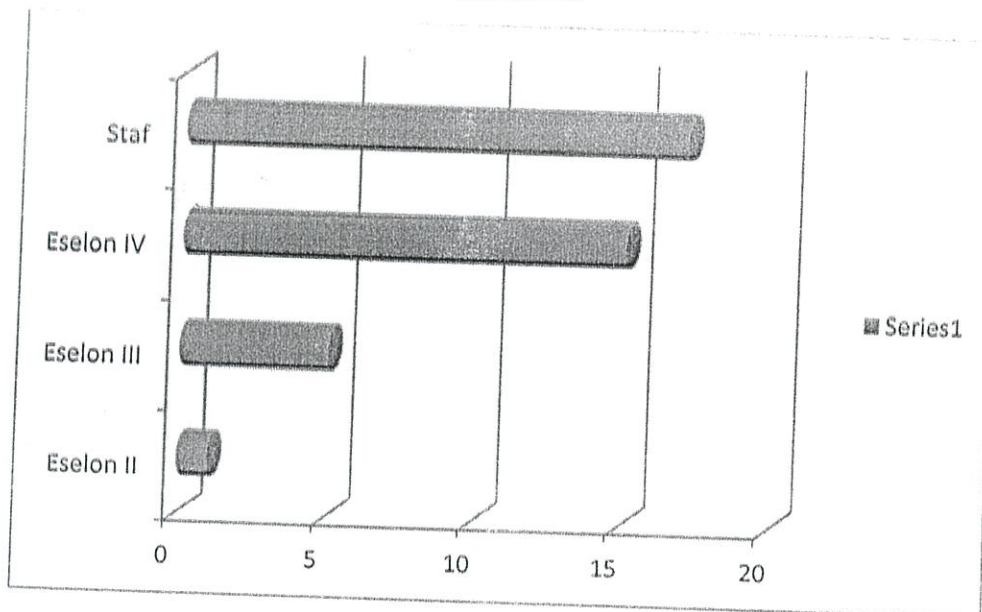
| No. | PENEMPATAN | Menurut Golongan | | | | Jumlah |
|-----|------------------------------------|------------------|----|-----|----|--------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1. | Kepala | - | - | - | 1 | 1 |
| 2. | Sekretariat | - | 3 | 7 | 1 | 11 |
| 3. | Bidang Promosi, Data dan Informasi | - | - | 4 | 1 | 5 |

| | | | | | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----------|----------|-----------|
| 4. | Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal Dan Perizinan. | - | 1 | 6 | 1 | 8 |
| 5. | Bidang Perizinan Sosial dan Ekonomi | - | - | 7 | - | 7 |
| 6. | Bidang Perizinan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Utilitas | - | 1 | 5 | - | 6 |
| Jumlah | | - | 4 | 31 | 4 | 38 |

JUMLAH PEGAWAI MENURUT GOLONGAN
GAMBAR. 1.KONDISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN DAN JABATAN
TABEL. 3

| No. | PENEMPATAN | ESELON DAN STAF | | | | Jumlah |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | II | III | IV | STAF PNS | |
| 1. | Kepala | 1 | - | - | - | 1 |
| 2. | Sekretariat | - | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 3. | Bidang Promosi, Data dan Informasi | - | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 4. | Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal Dan Perizinan. | - | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 5. | Bidang Perizinan Sosial dan Ekonomi | - | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 6. | Bidang Perizinan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Utilitas | - | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Jumlah | | 1 | 5 | 15 | 17 | 38 |

Pegawai Negeri Sipil Menurut Eselon dan Staf

KONDISI PEGAWAI BERDASARKAN ESELON
GAMBAR. 2.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DPMPSTP TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPSTP
 - 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
 - 3.3. Program dan Kegiatan
- BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Kerja DPMPPTSP Kota Batam TA. 2019 melaksanakan 3 (tiga) program dan 5 (lima) kegiatan dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 9.603.081.555 (Sembilan milyar enam ratus tiga juta delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah). Didalamnya terdapat 32 (tiga puluh dua) paket pekerjaan terdiri dari 23 (dua puluh tiga) paket penyedia dan 10 (sepuluh) paket swakelola sampai triwulan ke 2 per 31 Juni 2019 telah selesai dilaksanakan 14 (empat belas) paket pekerjaan dan sisanya sedang dalam pengerjaan dan proses pencairan.

Sasaran yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan TA. 2019 sebagaimana tertuang pada dokumen Penetapan Kinerja OPD Tahun 2019 adalah :

Sasaran 1 : Meningkatnya realisasi investas dengan indikator kinerja Realisasi Nilai Investasi target sebesar Rp. 275.305.620.585 dan telah tercapai sebesar Rp. 2.029.781Jt per Juni 2019 sehingga capaian kinerja pada sasaran ini telah tercapai 100%. DPMPPTSP Kota Batam masih dapat meningkatkan target indikator kinerja pada sasaran 1 dan akan dituangkan pada perubahan penetapan kinerja tahun 2019.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dengan indikator kinerja yaitu (1) Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan target 1300 perizinan/non perizinan dan telah tercapai sejumlah Izin. (2) Persentase waktu penyelesaian perizinan sesuai SOP target 90%, pada indikator ini masih

memerlukan rekapitulasi izin yang telah diterbitkan periode januari s/d juni 2019.

Selanjutnya realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang ada dalam Renja Perangkat Daerah tahun 2019 sampai triwulan ke 2 dapat dilihat sebagai pada tabel T-C.29 di halaman berikut :

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM

Tabel T-C.29

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017 | Target dan Realisasi Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (r-3) | | Target Program Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019) | Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2018 | Realisasi Target Kinerja Tahun 2018 | | | Tingkat Realisasi |
| 1 | 2 Program Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan | 3 - Persentase Realisasi Investasi | 4 659.419.480.054 | 5 663.356.000.000 | 6 225.660.344.742 | 7 433.935.200.000 | 9 275.305.620.585 | 10=(5+7+9) 1.372.596.820.585 | 11=(10/4) 208,15 |
| | 1 Kegiatan Promosi Penanaman Modal | Meningkatnya penyebaran informasi investasi daerah di dalam negeri (Output: Terselenggaranya promosi potensi daerah) | 15 Kali | 2 Kali | 3 Kali | 1 Kali | 4 Kali | 7 Kali | 46,67 |
| | 2 Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Bid.Pembangunan, Lingkungan Hidup dan Utilitas | Tertelaksananya operasional pelayanan publik (Output: Tertelaksananya pelayanan perizinan bidang lingkungan hidup dan utilitas) | 2000 Izin | 12.608 Izin | 11.300 Izin | 10.325 Izin | 1.300 Izin | 24.233 | 1.212 |
| | 3 Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Pembangunan Bid. Ekonomi dan Sosial | Menyelenggarakan perizinan ekonomi sosial (Output: Tertelaksananya pelayanan perizinan bidang ekonomi dan sosial) | 1200 Izin | 9000 Izin | Izin | 8780 Izin | 10.000 Izin | 18.780 | 1.565 |

| Kode Rekening | Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017 | Target dan Realisasi Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-3) | | | Target Program Kegiatan (Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2019) | Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2018 | Realisasi Target Kinerja Tahun 2018 | Tingkat Realisasi | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun p-1) 2019 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%) |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| II | Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | -Tersedianya administrasi Perkantoran yang menunjang tupoksi | 100% Per Tahun | 100% Per Tahun | 100% Per Tahun | 100% Per Tahun | 100% | 100% Per Tahun | 300% | 300 |
| | 1 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Output : Tersedianya sarana administrasi perkantoran) | 100% Per Tahun | 100% Per Tahun | 100% Per Tahun | 100% Per Tahun | 100% Per Tahun | 100% Per Tahun | 300% | 300 |
| III | Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pemerintahan | 100% Per Tahun | 100% Per Tahun | 100% Per Tahun | 50% | 50% | 50% | 200% | 200 |
| | 1 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Aparatur (Output : Sarana dan prasarana aparatur yang tersedia) | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 200% | 200 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rencana kerja DPMPTSP Tahun 2019 telah dilaksanakan sebagaimana dokumen Renja sebelumnya, sehingga perubahan rencana kerja hanya pada pengurangan anggaran yang berasal dari sisa paket pekerjaan yang telah dilaksanakan dan perubahan target indikator kinerja dari kedua sasaran OPD oleh karena target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya pada dokumen Renja maupun Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2019 dapat tercapai pada semester 1 tahun berjalan. Untuk itu perubahan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Batam Tahun 2019 fokus pada perubahan target indikator kinerja.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Batam sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan pemerintahan konkuren wajib non pelayanan dasar melaksanakan urusan penanaman modal. Oleh karena itu dalam Perwako Batam Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modan Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tugas fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis urusan penanaman modal;
- b. Menyelenggarakan promosi penanaman modal;
- c. Melaksanakan pembinaan penanaman modal dan;
- d. Monitoring, evaluasi pelaksanaan penanaman modal

Penanaman modal/investasi di Kota Batam tahun 2018 sebanyak 145 investasi senilai 318.149.8Jt, dilihat dari nilai yang diinvestasikan menurun dari di tahun 2017 sebanyak 61 investasi dengan nilai 663.356Jt dan di tahun 2016 tercatat 29 investasi senilai 815.971.3Jt. Tahun 2019 sampai bulan Juni 2019 tercatat sebanyak 205 investasi dengan nilai 2.029.781Jt dan serapan tenaga kerja sebanyak ... Pertumbuhan ekonomi di Kota Batam sangat dipengaruhi oleh penanaman modal yang terealisasi.

Menurut jenisnya realisasi investasi kebanyakan berasal dari sektor perdagangan dan reparasi sesuai dengan kondisi Kota Batam yang dikhususkan sebagai kota industri dan investasi. Berikut realisasi investasi kurun waktu 4 (empat) terakhir.

Realisasi Investasi PMDN 2015-2018*

Tabel 4.

| Tahun | Proyek | | Investasi (Rp. Juta) | | Tenaga Kerja | |
|-------|---------|-----------|----------------------|------------|--------------|-----------|
| | Rencana | Realisasi | Rencana | Realisasi | Rencana | Realisasi |
| 2015 | 33 | 20 | 1.441.211 | 319.925.50 | 1728 | 1.171 |
| 2016 | 34 | 29 | 165.411 | 815.971.3 | 1354 | 1.575 |
| 2017 | 86 | 61 | 1.781.979.8 | 663.356 | 15.425 | 3.656 |
| 2018 | 62 | 38 | 1.067.372.6 | 436.435.2 | 3.251 | 1.679 |
| Total | 215 | 148 | 4.455.974 | 2.235.688 | 21.758 | 8.081 |

Sumber : Bidang Promosi Datin

Sedangkan data realisasi investasi penanaman modal asing di Kota Batam sejak tahun 2015 s/d 2018 hanya mencapai 6.97% sebagaimana table di bawah ini :

Realisasi Investasi PMA 2015-2018*

Tabel 4.

| Tahun | Proyek | | Investasi (US\$.Ribu) | | Tenaga Kerja | |
|-------|---------|-----------|-----------------------|-------------|--------------|-----------|
| | Rencana | Realisasi | Rencana | Realisasi | Rencana | Realisasi |
| 2015 | 178 | 65 | 23.219.774.6 | 326.109 | 19.587 | 4.684 |
| 2016 | 146 | 71 | 5.167.386.1 | 462.844.5 | 11.750 | 4.571 |
| 2017 | 151 | 74 | 411.809.8 | 1.116.807.1 | 11.231 | 6.830 |
| 2018 | 73 | 41 | 305.700.8 | 124.281.5 | 6.057 | 2.537 |
| Total | 548 | 251 | 29.104.671.3 | 2.030.042 | 48.625 | 18.622 |

Sumber : Bidang Promosi Datin

Penyelenggaraan pelayanan publik layanan 53 jenis perizinan dan non perizinan di tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana diamanahkan dalam Permendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, bahwa kegiatan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya

mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu dan satu tempat, dimana ada pelimpahan kewenangan dari pejabat pemerintahan yang lebih tinggi (pemberi delegasi) ke pejabat yang lebih rendah (penerima delegasi). Selain melayani masyarakat yang langsung datang ke lokasi PTSP guna mendaftarkan izin usaha, masyarakat juga dapat melakukan pendaftaran perizinan dan non perizinan melalui aplikasi OSS dari tempat tinggal maupun tempat usaha. Penyelenggara OSS yang adalah lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sistem OSS ini sangat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh izin usaha dan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing.

Dari analisis kinerja pelayanan DPMPTSP Kota Batam dapat disimpulkan bahwa keberadaan Dinas adalah untuk membantu Kepala Daerah mewujudkan Misi 1 (Pertama) dan Misi 4 (Empat) RPJMD Kota Batam periode 2016-2021, maka DPMPTSP Kota Batam menetapkan Indikator Kinerja guna mengukur capaian sasaran strategis yang akan dicapai untuk 1 (satu) tahun berjalan dan 5 (lima) tahun kedepan. Selanjutnya pencapaian kinerja pelayanan DPMPTSP Kota Batam sampai tahun 2019 dapat dilihat pada 'tabel T-C.30 di halaman berikutnya.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Tabel. 5.

Tabel T-C.30

| No. | Indikator | SPM | IKK | Target Rensitra Perangkat Daerah | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Arealis |
|-----|-----------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | | | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | 2018 | 2019 (per Juni) | Tahun 2020 | |
| 1 | Realisasi Investasi | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 |
| 1 | Realisasi Investasi | | Realisasi Investasi | Rp225,660,344,742 | Rp275,305,620,585 | Rp 2,5 T | Rp 3 T | Rp2,029,781,000,000 | Rp 2.5T | Rp 3 T | - |
| | | | Penanaman Modal Yang Menyampaikan LKPM Secara Reguler | 5% (108 PM) | 5% | 5% | 5% | 100% (108pm) | 5% | 5% | |
| 2 | Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan | | Izin Usaha yang Diterbitkan | 11,300 Izin | 1,300 Izin | 100% | 100% | 10,080 Izin (89%) | 100% | 100% | |
| 3 | Persentase Waktu Penyelesaian Perizinan Sesuai SOP | | Menurunnya Persentase Aduan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan | N/A | -10% | -10% | -10% | +102,5% (41 aduan) | -10% | -10% | |
| | | | Persentase Jenis Perizinan dan Non Perizinan Yang Sudah online | 50% (36 Jenis) | 93% (41 Jenis) | 100% | 100% | 26% (10 Aduan) | 100% | 100% | |
| | | | Indeks kepuasan Masyarakat | Baik | Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | |

Lanjutan Tabel T-C.30

| No. | Indikator | SPM | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | Realisasi Capaian | | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|
| | | | | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | 2018 | 2019 (per mei) | Tahun 2020 | Tahun 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | |
| 1 | Cakupan layanan administrasi perkantoran | | | 100% | 100% per tahun | 100% per tahun | 100% per tahun | 100% per tahun | 100% per tahun | 100% per tahun | - | |
| | Cakupan sarana dan prasarana aparatur | | | 100% | 100% per tahun | 100% per tahun | 100% per tahun | 50% per tahun | 100% per tahun | 100% per tahun | - | |

jaminan kepada para investor dan masyarakat akan kepastian hukum dalam memperoleh layanan perizinan dan berinvestasi serta hak masyarakat mendapatkan pelayanan prima.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan awal RKPD penyusunan rencana kerja TA. 2019 dan Perubahan RKPD hanya pada besaran anggaran yang disesuaikan dengan nilai kontrak pada paket pekerjaan di 5 (lima) kegiatan yang dilaksanakan dan tidak mengurangi target capaian kinerja. Pada APBD murni sebesar Rp. 9.603.081.555 sedang usulan Perubahan APBD menjadi sebesar Rp. 8.160.622.277 untuk melaksanakan 3 (tiga) program dan 5 (lima) kegiatan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- Tujuan OPD : Terwujudnya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi dengan pelayanan prima, dengan 2 sasaran yaitu :
 1. Meningkatnya realisasi penanaman modal dan perlindungan investasi, dengan indikator kinerja :
 - Realisasi investasi;
 - Persentase penanaman modal yang menyampaikan LKPM secara regular;
 - Menurunnya persentase aduan masyarakat terhadap layanan perizinan.
 2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, dengan indikator kinerja :
 - Persentase jenis perizinan dan non perizinan yang sudah online;
 - Indeks kepuasan masyarakat (IKM).

Rincian program, kegiatan dan indikator kinerja terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat lebih jelas dalam table T-C. 31 di bawah ini :

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

| No. | RANCANGAN AWAL RKPD 2019 | | | | | ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program /Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | Catatan Penting |
| I | 2 Program Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan | 3 | 4 Realisasi investasi | 5 Rp.275.305.620.585 | 6 7.401.096.880 | 7 Program Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan | 8 | 9 Realisasi investasi; | 10 Rp.2.5 Tr | 11 6.036.367.090 | 12 |
| | Kegiatan Promosi Penanaman Modal | Batam | Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan | 1300 izin | 1:5.660.000 | Kegiatan Promosi Penanaman Modal | Batam | Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan | 1850 izin | 113.169.500 | |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Bid. Pembangunan, Lingkungan Hidup dan Utilitas | Batam | Persentase waktu penyelesaian perizinan sesuai SOP | 90% | 73.600.000 | Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Bid. Pembangunan, Lingkungan Hidup dan Utilitas | Batam | Persentase waktu penyelesaian perizinan sesuai SOP | 90% | 70.500.000 | |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Bid. Ekonomi dan Sosial | Batam | Persentase waktu penyelesaian perizinan sesuai SOP | 90% | 7.211.836.880 | Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Bid. Ekonomi dan Sosial | Batam | Persentase waktu penyelesaian perizinan sesuai SOP | 90% | 5.852.637.590 | |
| II | Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah | 100% per tahun | 2.093.809.675 | Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah | 100% per tahun | 2.027.610.187 | |
| | Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Batam | | 100% | 2.093.809.675 | Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Batam | | 100% | 2.027.610.187 | |

Lanjutan Tabel T-C.31

| No. | RANCANGAN AWAL RKPd 2019 | | | | | ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program /Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | Catatan Penting |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Batam | Meningkatnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah | 100% | 108.175.000 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Batam | Meningkatnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah | 100 % | 96.645.000 | |
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Batam | Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur | 100% | 108.175.000 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Batam | Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur | 100% | 96.645.000 | |

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses usulan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam diusulkan melalui Rancangan Awal RKPD kepada Sekretaris Daerah Kota Batam oleh Kepala OPD yang kemudian dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan atas usulan rancangan awal Dinas.

Selanjutnya rancangan awal Renjaj Perangkat Daerah disempurnakan dengan mengacu pada hasil forum perangkat daerah yang menghasilkan rancangan awal Renja PD yang telah disempurnakan dan rancangan awal Renja DPMPTSP Kota Batam diserahkan kepada Bappelitbangda Kota Batam untuk diverifikasi.

Ranwal Renja PD yang telah disempurnakan berdasarkan saran dan pertimbangan forum PD merupakan proses penyempurnaan Panwal Renja PD berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah. Kemudian Rancangan Renja PD dibahas dan disempurnakan dalam forum PD disajikan dengan sistematika sesuai Pasal 129 untuk diserahkan ke Bappelitbangda Kota Batam guna verifikasi setelah itu dapat disempurnakan dan diperbaiki sesuai hasil verifikasi.

Proses penyempurnaan Rancangan Renja PD menjadi Rancangan Akhir PD berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD. Penyusunan dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam peraturan walikota tentang RKPD dan diverifikasi kembali oleh Bappelitbangda Kota Batam dan ditetapkan sebagai Renja PD setelah RKPD Kota Batam ditetapkan melalui peraturan walikota.

Melalui proses di atas DPMPTSP Kota Batam tidak memiliki usulan program/kegiatan yang berasal dari masyarakat melalui pelaksanaan musrenbang mulai tingkat kelurahan,

kecamatan maupun kota akan tetapi program dan kegiatan yang diusulkan oleh DPMPTSP Kota Batam sesuai dengan tugas fungsi PD dan Rencana Strategis Dinas dalam mengemban Misi 4 (empat) yang ada di dalam RPJMD Kota Batam periode 2016-2021.

Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota tidak memiliki usulan program dan kegiatan yang berasal dari usulan masyarakat melalui mekanisme pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) baik tingkat kelurahan, kecamatan maupun kota dan forum OPD. Meski demikian DPMPTSP Kota Batam sesuai tugas fungsinya didalam melaksanakan pelayanan publik berupaya meningkatkan kualitas pelayanan terpadu satu pintu dengan memberikan layanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah dan terjangkau oleh masyarakat dengan cara proses layanan perizinan dilakukan secara elektronik. Adapun tabel usulan program dan kegiatan masyarakat sebagai berikut :

Tabel 6.
Daftar Usulan Masyarakat

| Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran Volume | Catatan |
|------------------|--------|-------------------|----------------|---------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | |
| N I H I L | | | | |
| | | | | |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tabel 6.

| No | Indikator Kinerja | Capaian Sasaran pada Renstra OPD Kabupaten/Kota | Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi | Capaian Sasaran pada Renstra K/L |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Realisasi Investasi | Meningkatnya realisasi penanaman modal dan perlindungan investasi | Meningkatnya realisasi investasi | Meningkatkannya realisasi penanaman modal nasional yang berorientasi pada kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemantauan penanaman modal |
| 2. | Persentase Penanaman Modal yang menyampaikan LKPM secara reguler | | Terwujudnya minat kerjasama penanaman modal | Meningkatnya minat penanaman modal melalui efektivitas kegiatan promosi yang tepat sasaran |
| 3. | Menurunnya persentase aduan masyarakat terhadap layanan perizinan | | | |
| 4. | Persentase jenis perizinan dan non perizinan yang sudah online | Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan | | Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang penanaman modal |
| 5. | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | |

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang tertuang di dalam Renstra DPMPSTSP Kota Batam yang adalah terjemahan dari visi dan misi Kepala Daerah (Walikota) RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021, maka DPMPSTSP Kota Batam

menetapkan tujuan, sasaran dan indikator Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 7.

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Terwujudnya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi dengan pelayanan prima | Meningkatnya realisasi penanaman modal dan perlindungan investasi | Realisasi Investasi |
| | | Persentase Penanaman Modal yang menyampaikan LKPM secara reguler |
| | | Menurunnya persentase aduan masyarakat terhadap layanan perizinan |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan | Persentase jenis perizinan dan non perizinan yang sudah online |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat |

Fungsi dari tujuan dan sasaran OPD adalah guna mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan terlaksana sesuai dengan arah pembangunan daerah yang ditetapkan. Sedangkan indikator kinerja bertujuan untuk mengukur capaian terhadap sasaran OPD. Sehingga pelaksanaan program dan kegiatan merupakan rangkaian dari pelaksanaan pembangunan daerah Kota Batam yang tepat dan berkesinambungan hingga 5 (lima) tahun ke depan.

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan DPMPSTP di Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

- Rendahnya daya saing investasi daerah;
- Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang profesional, transparan, mudah dan cepat;
- Sumber daya aparatur yang memahami tugas fungsi;
- Sarana dan prasarana yang memadai.

Alokasi anggaran pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 8.160.622.277 (delapan milyar seratur enam puluh juta enam ratus dua puluh dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah), DPMPSTP Kota Batam melaksanakan 3 (tiga) program dan 5 (lima) kegiatan yakni :

- I. Program Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan, yang terdiri dari 3 kegiatan yaitu :
 1. Kegiatan Promosi Penanaman Modal, sebesar Rp. 113.169.500;
 2. Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Bid. Pembangunan Lingkungan Hidup dan Utilitas, sebesar Rp. 70.500.000;
 3. Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Bid. Pembangunan Ekonomi dan Sosial, sebesar Rp. 5.852.697.590.
- II. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 1 (satu) kegiatan :
 1. Kegiatan Peningkatan Administrasi Perkantoran, sebesar Rp. 2.027.610.187.
- III. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 1 (satu) kegiatan :
 1. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 96.645.000.

Selanjutnya rumusan program dan kegiatan telah sesuai dengan rancangan awal RKPD, sehingga perubahan Rencana Kerja (Renja) DPMPSTP Kota Batam tidak terdapat perbedaan antara rencana target kinerja dan target capaian kinerja sebagaimana pada table T-C.33 di bawah ini.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
Tabel 7.

Tabel T-C.33

| Kode Rekening | Program/ Kegiatan | Lokasi | Perubahan Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| | | | Indikator Kinerja | Target Capaian | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | | |
| | | | | | APBD II | APBD I | | | APBN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.02.12.1.02.12.01.15. | Program Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan | | Realisasi investasi | Rp 2.5 T | 6.036.367.090 | | | | Rp 2.5 T | 7.152.816.032 |
| 1.02.12.02.12.01.15.01. | Kegiatan Promosi Penanaman Modal | Ba-am, Semarang | Meningkatnya minat penanaman modal | 1 laporan rekapitulasi minat penanaman modal | 113.169.500 | - | - | | 1 laporan rekapitulasi minat penanaman modal | 321.760.000 |
| 1.02.12.1.02.12.01.15.04. | Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Bid. Pembangunan Lingkungan Hidup dan Utilitas | Batam | Persentase waktu penyelesaian sesuai SOP perizinan bid. Pembangunan dan lingkungan hidup | 90 % | 70.500.000 | - | - | | 90% | 53.800.000 |
| 1.02.012.1.02.12.01.15.05. | Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Bid. Ekonomi dan Sosial | Batam | Persentase waktu penyelesaian sesuai SOP perizinan Bid. Ekonomi dan Sosial | 90% | 5.852.697.590 | - | - | | 90% | 147.074.832 |

Lanjutan Tabel T-C.33

| Kode Rekening | Program/ Kegiatan | Lokasi | Perubahan Rencana Tahun 2019 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | Indikator Kinerja | Target Capaian | Sumber Dana | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| | | | | | APBD II | APBD I | APBN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.02.12.1.02.12.01.15. | Program Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal | Batam: | Persentase penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP | 90% | - | - | - | - | 90% | 7.152.816.032 |
| | | Batam: | Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang menyampaikan LKPM secara reguler | - | - | - | - | - | 5% | 100.000.000 |
| | Kegiatan Operasional Mal Pelayanan Publik | Batam | Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan | - | - | - | - | - | Indeks A (\$2.26-100) | 6.290.181.200 |
| | Kegiatan Pemutakhiran Data Investasi | Batam | Meningkatnya kualitas informasi investasi daerah | - | - | - | - | - | 10 Propinsi/ Kab/Kota | 240.000.000 |

Lanjutan Tabel T-C.33

Tabel T-C.33

| Kode Rekening | Program/ Kegiatan | Lokasi | Perubahan Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | | |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| | | | Indikator Kinerja | Target Capaian | APBD II | Sumber Dana APBD I | | APBN | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pegu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.02.1.02.12.01.01. | Program Peningkatan Administrasi Perkantoran | | Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD | 100% per tahun | 2.027.610.187 | | | | 100 per tahun | 3.440.857.580 |
| 1.02.1.02.12.01.01.01. | Kegiatan Peningkatan Administrasi Perkantoran | Batam | Meningkatnya Kinerja dan pelayanan aparatur | 100% | 2.027.610.187 | - | - | Perubahan anggaran sisa paket pekerjaan | 100% | 3.440.857.580 |
| 1.02.1.02.12.01.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Batam | Meningkatnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD | 50 % | 96.645.000 | - | - | | 100% | 25.276.000 |
| 1.02.1.02.12.01.02.01. | Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Batam | Meningkatnya Kinerja dan pelayanan aparatur | 50% | 96.645.000 | - | - | Perubahan anggaran sisa paket pekerjaan | 100% | 25.276.000 |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Rencana Kerja (Renja) dan Pendanaan DPMPTSP Kota Batam Tahun Anggaran 2019 telah diinput ke dalam aplikasi *e-planning* Pemerintah Kota Batam, oleh karena untuk dapat menjadi pembanding antara Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dan Rencana Kerja (Renja) pada aplikasi *e-planning* dapat dilihat pada lampiran hasil cetakan aplikasi *e-planning*.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan perencanaan pembangunan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun Anggaran 2019. Sebagaimana disebut dengan Rencana Kerja (Renja) diharapkan dokumen perencanaan tahunan ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun.

Pada pertengahan tahun berjalan, seluruh Perangkat Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui apakah target indikator kinerja dapat tercapai dan terlaksana dengan baik serta mengurai permasalahan atau kendala yang dihadapi sehingga rencana kerja yang telah disusun dapat terlaksana sebagaimana mestinya dan memenuhi perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan oleh Kepala Dinas dan Walikota.

Perubahan Renja Kerja (Renja) TA. 2019 DPMPTSP Kota Batam disusun berdasarkan rumusan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD dan RPJMD Kota Batam 2016-2021, juga sesuai dengan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan yang memengaruhi pada target indikator kinerja Dinas DPMPTSP tahun 2019 yakni realisasi investasi dan jumlah izin yang diterbitkan dilakukan perubahan berdasarkan realisasi capaian target hingga bulan Juni.


Pada akhirnya dengan disusunnya perubahan rencana kerja ini semoga dapat memberikan motivasi bagi Perangkat Daerah untuk mencapai target indikator kinerja Dinas dan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah Kota Batam.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan rahmat-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam TA. 2019 dapat disusun sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah baik rencana tahunan RKPMD maupun dokumen rencana jangka menengah lima tahunan (RPJMD) dan jangka panjang (RPJPD).

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahunan DPMPSTP Kota Batam Tahun 2019 harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk tahun 2019 di dalam dokumen Renstra Dinas. Perubahan Renja juga harus mengacu pada pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan daerah dan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tercantum pada Peraturan Walikota Batam Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan RKPMD Kota Batam Tahun 2019.

Perubahan Renja PD merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen Renja dan Renstra Dinas yang memuat sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja untuk dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya dan melaporkan realisasi capaian kinerja pada akhir tahun 2019.

Batam, 29 Juli 2019
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU
KOTA BATAM

FIRMANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP.19680412 198909 1 002